



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 25 Januari 2021

Halaman: 1

**PENGUSAHA HOTEL NGOS-NGOSAN, OMZET PEDAGANG
MALIOBORO TURUN DRASTIS**

**Perpanjangan Pengetatan Kegiatan
Masyarakat Diprotes**

UMBULHARJO (MERAPI) - Sejumlah pengusaha hotel di Yogyakarta dan pelaku usaha kawasan Malioboro menolak perpanjangan kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Pasalnya pemberlakuan PTKM selama 11-25 Januari 2021 telah berdampak pada pesanan kamar hotel dan omzet pengusaha anjlok. Penerapan PTKM juga dinilai tidak berdampak signifikan pada penurunan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Yogyakarta.

"Kami PHRI DIY menolak perpanjangan PTKM itu. Dampak dari PTKM ini menyebabkan tingkat hunian merosot tajam," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono kepada wartawan, Minggu (24/1).

Menurutnya sampai kini tingkat hunian kamar hotel turun menjadi sekitar 13,5 persen. Sedangkan dari 400 anggota PHRI DIY, 200 hotel dan restoran di antaranya kondisinya hampir mati, 30 hotel dan restoran sudah mati dan sisanya terengah-engah. Dengan kondisi itu dia menilai sulit untuk bertahan. Sebagian karyawan hotel juga dirumahkan.

"Ditambah ada PTKM, reservasi hotel melorot. Memang iya, hotel tetap bisa buka dan menerima tamu dengan PTKM. Kami masih buka tapi orang dari luar mau berwisata ke suatu daerah, masih ragu diterima atau tidak," ujarnya.

Pihaknya berharap komitmen pemerintah di awal yakni antara kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan bukan saling mematikan. Dia menyampaikan jika nanti PTKM diperpanjang, pemerintah harus bertanggung jawab dengan adanya relaksasi untuk PLN, BPJS, pajak dan lainnya.

Sedangkan Ketua Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) Sadana Mulyono juga menolak perpanjangan PTKM di Yogyakarta. Dia menyatakan kebijakan PTKM berdampak pada menurunnya omzet hingga 50 persen dan kondisi Malioboro sepi. Selain itu kebijakan PTKM dinilai tidak berdampak signifikan pada jumlah kasus Covid-19.

** Bersambung ke halaman 9*

Perpanjangan Sambungan halaman 1

"Kami menolak diperpanjang karena tidak signifikan pada kasus Covid-19 dan penularan kebanyakan di keluarga. Yang harusnya diperketat adalah kerumunan, protokol kesehatan dan pembatasan keluar masuk penduduk luar daerah," tambah Sadana.

Sebelumnya, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan Pemkot Yogyakarta akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sampai 8 Februari 2021. Namun untuk menindaklanjutinya, pihaknya menunggu kebijakan tertulis dari pemerintah pusat dan Pemda DIY.

"Mau nggak mau kita harus mengikuti. Tetapi kami kaji bersama-sama. Pernyataan pemerintah pusat yang mengubah jam tutup usaha selama PPKM menjadi pukul 20.00 WIB itu sebenarnya kelonggaran," ucap Heroe.

Terkait relaksasi pajak hotel dan restoran, dia menyatakan tidak bisa diberikan karena tidak memungkinkan dari sisi aturan. Hal yang bisa dilakukan mengurangi denda dan menunda pembayaran. Tapi pihaknya akan mengkaji semuanya supaya persoalan dari dampak PTKM sehingga ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh. (Tri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005